RESEARCH WORKING PAPER & PREPRINT SERIES
Independent Research & Feasibility Study Publication

Dokumen ID: CAC-WP-2026-003
ResearchGate Open Access Preprint
Terbit Online: Maret 2026

MODEL DISTRIBUSI LOGISTIK HOSPITALITY DAN REKONSTRUKSI KEPASTIAN KONTRAK PASOKAN DI KAWASAN 3T: STUDI KASUS EMPIRIS KABUPATEN PESISIR BARAT

Ilham Pradani*

Divisi Riset & Pengembangan (R&D), PT CHAIN ASIA CONECT, Jakarta & Pesisir Barat, Indonesia

Preprint DOI: 10.13140/RG.2.2.14820.91520 | ResearchGate Working Paper Series
Riwayat Naskah (Article History): Received: 15 Jan 2026 | Revised: 20 Feb 2026 | Accepted: 10 Mar 2026 | Published: 31 Mar 2026

A B S T R A K

Pertumbuhan pesat sektor pariwisata bahari di Kabupaten Pesisir Barat, khususnya kawasan Krui sebagai tuan rumah ajang kejuaraan selancar internasional World Surf League (WSL), menciptakan lonjakan permintaan terhadap komoditas hospitality berkualitas tinggi (daging, keju, produk susu, serta sayur dan buah segar). Kendati demikian, letak geografis Krui yang terisolasi di balik bentang alam Taman Nasional Bukit Barisan Selatan (TNBBS) memunculkan kendala rantai pasok 'last-mile' yang akut. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis problematika operasional rantai pasok logistik serta kerentanan hukum perikatan dalam perjanjian pasokan bahan baku pada industri perhotelan/villa di Krui. Menggunakan pendekatan yuridis-empiris yang dipadukan dengan studi lapangan eksploratori, data dihimpun melalui observasi partisipatif dan wawancara mendalam dengan pelaku hospitality (Villa Nalu dan Surfmatra) serta penyedia logistik lintas barat Sumatera. Hasil penelitian menunjukkan: (1) Pelaku hospitality mengalami distorsi biaya pengadaan hingga 35-45% lebih tinggi dibandingkan harga di Bandar Lampung dengan tingkat pembusukan (spoilage) produk dingin mencapai 15-20% akibat minimnya infrastruktur cold-chain; (2) Hubungan kerja sama pasokan selama ini didasarkan pada kesepakatan lisan tanpa perjanjian tertulis berstandar Service Level Agreement (SLA), sehingga memicu kerentanan wanprestasi dan tidak adanya kepastian pembebanan risiko saat terjadi gangguan alam tanah longsor; (3) Rekonstruksi model distribusi kolaboratif terpadu berbasis konsolidasi mikro fisik dan digital, yang saat ini tengah diuji dalam studi kelayakan (feasibility study) pendahuluan oleh Divisi R&D PT CHAIN ASIA CONECT, menawarkan solusi terstruktur dalam mitigasi disparitas harga dan proteksi kepastian hukum bagi pelaku UMKM pariwisata 3T.

Kata Kunci: Logistik Rantai Pasok, Kawasan 3T Krui, Industri Hospitality, Perjanjian Pasokan, Kepastian Hukum Kontrak, Feasibility Study.

A B S T R A C T

The rapid growth of marine tourism in Pesisir Barat Regency, notably Krui as an international surfing hub hosting the World Surf League (WSL) series, has driven high demand for hospitality-grade supplies (meat, cheese, dairy, and fresh produce). However, Krui's geographic isolation behind the Bukit Barisan Selatan National Park (TNBBS) generates severe 'last-mile' logistics bottlenecks. This study aims to examine the operational vulnerabilities of the hospitality supply chain and analyze the contractual vulnerabilities governing raw material procurement in remote hospitality enterprises. Employing a socio-legal empirical approach combined with exploratory fieldwork, empirical data were gathered through on-site observations and in-depth interviews with accommodation operators (Villa Nalu and Surfmatra) and regional logistics couriers. Findings reveal that: (1) Hospitality operators encounter a 35-45% procurement cost mark-up relative to Bandar Lampung wholesale markets, with cold-storage spoilage rates reaching 15-20% due to absent reefer logistics; (2) Commercial transactions rely almost exclusively on informal verbal understandings lacking standardized Service Level Agreements (SLAs), creating severe default exposure and ambiguous risk distribution during landslide-induced transit blockades; (3) A collaborative logistics distribution model underpinned by micro-consolidation hubs and standardized bilateral supply agreements—currently under preliminary feasibility study by the R&D Division of PT CHAIN ASIA CONECT—provides a robust pathway to suppress price disparity and uphold legal certainty for tourism MSMEs in underdeveloped coastal zones.

Keywords: *Hospitality Supply Chain, 3T Coastal Zone, Supply Agreement, Contractual Certainty, Last-Mile Logistics, Preliminary Feasibility Study.*

© 2026 PT CHAIN ASIA CONECT Research & Development. Distributed under CC BY-NC-ND 4.0 License.

***Korespondensi Penulis:** Divisi Riset & Pengembangan PT CHAIN ASIA CONECT, Jakarta & Krui, Indonesia.
E-mail: ilhampradani@chainasiaconnect.co.id

1. Pendahuluan

Kabupaten Pesisir Barat, yang dimekarkan dari Kabupaten Lampung Barat berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2012, merupakan salah satu wilayah terluar di pesisir barat Pulau Sumatera yang berhadapan langsung dengan Samudera Hindia. Secara geografis dan administratif, kawasan ini tergolong sebagai daerah Tertinggal, Terdepan, dan Terluar (3T) sebagaimana termaktub dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (Bappenas, 2023). Namun demikian, di balik keterbatasan aksesibilitas fisik, pesisir Krui—terutama Pantai Tanjung Setia dan Pantai Mandiri—telah berkembang menjadi episentrum pariwisata bahari kelas dunia. Keberadaan gelombang ombak bertaraf internasional menempatkan Krui dalam kalender resmi kompetisi selancar bergengsi World Surf League (WSL) Krui Pro, yang setiap tahunnya menarik ribuan atlet profesional, ofisial, dan turis mancanegara dari Australia, Eropa, dan Amerika Serikat (WSL, 2024; BPS Pesisir Barat, 2023).

Ledakan kunjungan wisatawan internasional tersebut membawa konsekuensi langsung terhadap standar kebutuhan operasional industri perhotelan dan penginapan lokal (hospitality). Para pengelola villa dan resort dituntut menyajikan menu makanan berkualitas internasional, mulai dari daging sapi potong impor (chilled beef), aneka keju olahan, mentega, susu segar pasteurisasi, hingga sayuran salad segar non-tropis. Kebutuhan ini melahirkan kontradiksi operasional harian yang tajam di lapangan. Di satu sisi, pengelola penginapan dituntut menjaga standar pelayanan prima bagi tamu asing; di sisi lain, Krui tidak memiliki sentra peternakan maupun pertanian hortikultura dingin komersial. Akibatnya, lebih dari 90% pasokan bahan pangan non-ikan harus didatangkan dari luar wilayah, utamanya melalui perjalanan darat sejauh 240 kilometer dari Kota Bandar Lampung melintasi kawasan hutan lindung perbukitan.

Dalam literatur manajemen rantai pasok pariwisata (tourism supply chain), Zhang et al. (2020) menggarisbawahi bahwa kepuasan tamu dan keberlanjutan usaha perhotelan sangat bergantung pada stabilitas jaringan distribusi bahan pangan dan keandalan logistik rantai dingin (cold chain). Kajian terdahulu oleh Widodo et al. (2021) di Kepulauan Anambas maupun Thahir et al. (2021) di Kepulauan Togean memperlihatkan bahwa wilayah terpencil kerap terjebak dalam lonjakan ongkos angkut akibat ketidakseimbangan muatan balik (load imbalance) dan ketiadaan sarana pendingin. Namun, sebagian besar studi terdahulu memandang persoalan ini sebatas kendala teknis transportasi belaka, tanpa menelaah kerentanan hukum perikatan perdata yang dihadapi pelaku usaha kecil saat terjadi kegagalan pasokan di lapangan.

Di ranah hukum perikatan bisnis, Gunawan & Siregar (2022) serta Hartono & Wahyudi (2023) mengingatkan bahwa ketiadaan kontrak pasokan tertulis (written commercial supply contract) menempatkan pelaku UMKM pada posisi tawar yang sangat rapuh. Sesuai asas kebebasan berkontrak (Pasal 1338 KUHPerdata), perjanjian semestinya memberikan perlindungan seimbang, kepastian Service Level Agreement (SLA), dan mekanisme pembagian risiko yang adil ketika terjadi keadaan kahar (force majeure) (Subekti, 2020). Sayangnya, dalam kenyataan sehari-hari di Krui, pengadaan bahan makanan masih berjalan secara serba lisan (informal gentlemen's agreement), sehingga para pemilik villa menanggung sendiri seluruh kerugian ketika barang rusak atau pasokan macet.

Kebaruan Penelitian (Novelty): Berangkat dari pengamatan langsung di lapangan, artikel ini menghadirkan kebaruan ilmiah dengan mengintegrasikan dua dimensi yang selama ini dikaji terpisah: (1) hambatan empiris logistik rantai dingin 'last-mile' di rute konservasi ekologis rawan bencana (lintas TNBBS), dan (2) rekonstruksi kepastian hukum kontrak komersial bagi UMKM perhotelan di kawasan 3T. Model terpadu ini memadukan pembentukan fasilitas penyangga (micro-cold storage hub) dengan standarisasi kontrak pasokan ber-SLA, yang saat ini tengah diuji dalam studi kelayakan (preliminary feasibility study) oleh Divisi Riset & Pengembangan PT CHAIN ASIA CONECT di Kabupaten Pesisir Barat. Penelitian ini menjawab dua pertanyaan esensial: bagaimana karakteristik distorsi logistik fisik di Krui dan bagaimana rekonstruksi model hukum-operasional mampu memberikan kepastian berusaha bagi para pelaku pariwisata lokal?

2. Metode

Penelitian ini menerapkan pendekatan **yuridis-empiris** (socio-legal research) yang dipadukan dengan studi lapangan kualitatif-eksploratori secara langsung di lokasi (Soekanto & Mamudji, 2021). Pendekatan yuridis-empiris dipilih guna melihat secara jernih bagaimana asas-asas hukum perikatan—khususnya asas konsensualisme (Pasal 1320 KUHPerdata) dan asas iktikad baik (Pasal 1338 ayat 3 KUHPerdata)—bekerja dalam praktik nyata transaksi pasokan di daerah terpencil.

Subjek & Lokasi Penelitian: Pengumpulan data lapangan dilaksanakan di sentra akomodasi pariwisata Kabupaten Pesisir Barat, khususnya kawasan Pantai Mandiri dan Tanjung Setia. Penentuan informan dilakukan secara purposif (purposive sampling) untuk memperoleh pemahaman yang mendalam dan manusiawi. Informan kunci meliputi: (a) Pengelola dan pemilik usaha akomodasi representatif: Ibu Marlin selaku pemilik dan pengelola Villa Nalu Krui yang kami

temui langsung dalam sesi perbincangan mendalam, serta jajaran manajemen operasional Surfmatra di Krui Selatan yang dipimpin Kak Dinda selaku General Manager; (b) Pelaku armada angkutan logistik independen dan kurir travel kargo rute Bandar Lampung–Krui; serta (c) Tim survei lapangan Divisi R&D PT CHAIN ASIA CONECT yang mendampingi proses studi kelayakan.

Teknik Pengumpulan & Analisis Data: Data primer dihimpun melalui wawancara mendalam (in-depth interview) semi-terstruktur berdurasi 60-90 menit mengenai siklus belanja harian, fluktuasi harga, pengalaman barang rusak di jalan, dan penanganan sengketa dengan suplier. Pengamatan partisipatif dilakukan langsung di area penyimpanan dapur villa, pengecekan boks styrofoam berpendingin es batu, serta pengamatan rute jalan lintas hutan lindung TNBBS. Data sekunder diperoleh dari penelaahan KUHPerdata, literatur hukum bisnis, data BPS Pesisir Barat, dan laporan teknis WSL Asia Pasifik. Data dianalisis secara interaktif mengadopsi model Miles, Huberman, & Saldana (2020) melalui reduksi data, penyajian matriks komparatif beban biaya, dan triangulasi sumber untuk menjamin validitas temuan.

3. Hasil dan pembahasan

Realitas Empiris: Hambatan Logistik 'Last-Mile' Melintasi Jalur TNBBS

Ketika menempuh perjalanan darat selama 7 hingga 8 jam melintasi lebatnya kawasan hutan Taman Nasional Bukit Barisan Selatan (TNBBS) dari Bandar Lampung menuju Krui, tantangan fisik yang dihadapi para pelaku usaha pariwisata terasa sangat nyata. Jalan Lintas Barat Sumatera sepanjang 240 kilometer ini merupakan urat nadi tunggal pasokan darat. Jalur ini memiliki kontur perbukitan curam, tikungan sempit, minim penerangan, dan membelah lereng tebing yang sangat labil terhadap bencana tanah longsor serta pohon tumbang, terutama saat curah hujan tinggi antara Oktober hingga April.

Dalam kondisi cuaca normal, mobil travel atau truk kargo barang membutuhkan waktu tempuh 7-8 jam. Namun, manakala terjadi longsor di kawasan tebing TNBBS, jalur transportasi kerap lumpuh total selama 18 hingga 36 jam. Dari hasil peninjauan langsung di Villa Nalu dan Surfmatra, terungkap kenyataan bahwa seluruh pasokan bahan pangan dingin saat ini dibawa menggunakan kendaraan umum atau mobil bak terbuka tanpa pendingin (non-refrigerated vehicles). Pemasok hanya mengandalkan boks styrofoam yang diisi es batu cair. Dalam paparan suhu udara tropis (30°C hingga 34°C) selama perjalanan meliuk-liuk di perbukitan, es batu mencair jauh sebelum tiba di Krui, mengakibatkan komoditas sensitif—seperti daging sapi chilled, keju, yoghurt, selada, dan tomat ceri—mengalami pembusukan (spoilage) parah sebelum sempat dimasak.

Tabel 1. Matriks Disparitas Harga, Durasi Transit, dan Tingkat Kerusakan Bahan Baku Hospitality di Krui Dibandingkan Kota Bandar Lampung

Kategori Komoditas Bahan Baku	Harga Rata-rata Grosir Bandar Lampung (Rp/Kg)	Harga Pasokan Tiba di Krui (Rp/Kg)	Disparitas Harga (%)	Tingkat Spoilage (%)	Moda Transportasi Eksisting
Daging Sapi Sirloin / Tenderloin Chilled	Rp 135.000	Rp 195.000	+44,4%	18,5%	Styrofoam box + es batu cair (Non-Reefer)
Produk Olahan Susu (Keju & Butter)	Rp 110.000	Rp 150.000	+36,3%	14,0%	Mobil travel penumpang / kargo titipan
Sayuran Daun Segar (Salad Grade)	Rp 22.000	Rp 32.000	+45,4%	22,5%	Truk sayur bak terbuka tanpa pendingin
Buah-Buahan Impor (Apel, Beri, Jeruk)	Rp 45.000	Rp 62.000	+37,7%	12,0%	Kargo darat reguler
Bahan Pokok Kering (Beras & Minyak)	Rp 14.500	Rp 17.500	+20,6%	2,5%	Truk ekspedisi kelontong

Sumber: Data Primer Diolah dari Hasil Wawancara Mendalam & Survei R&D PT CHAIN ASIA CONECT (2026).

Sebagaimana tersaji pada Tabel 1, disparitas harga bahan baku segar di Krui berkisar antara 36,3% hingga 45,4% lebih mahal dibandingkan harga pasar induk di ibukota provinsi. Disparitas ini bukan semata-mata margin keuntungan pedagang perantara, melainkan biaya premi risiko transportasi (risk premium) dan kompensasi atas tingkat penyusutan barang yang mencapai 18,5% untuk daging dan 22,5% untuk sayuran segar. Kondisi ini secara nyata menekan margin profitabilitas operasional villa dan resort di Krui, yang terpaksa menetapkan tarif makanan tinggi bagi turis atau menanggung beban operasional yang membengkak.

Kerentanan Yuridis Praktik Transaksi Spot dan Ketiadaan Perlindungan Hukum Kontrak

Penelitian ini menemukan bahwa seluruh transaksi pengadaan bahan baku hospitality di Krui berlangsung dalam format transaksi spot informal melalui sambungan telepon seluler atau pesan instan WhatsApp. Pola ini tidak disertai dengan penandatanganan kontrak pasokan komersial formal (formal written procurement contract). Berdasarkan Pasal 1320 KUHPerdata, kesepakatan lisan memang sah sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya sesuai asas konsensualisme dan asas pacta sunt servanda (Pasal 1338 ayat 1 KUHPerdata). Namun, dalam ranah hukum pembuktian (Pasal 1866 KUHPerdata), perjanjian lisan memiliki kelemahan pembuktian yang fatal ketika salah satu pihak melakukan wanprestasi.

Dalam wawancara mendalam dengan Ibu Marlin di Villa Nalu, terungkap beberapa bentuk sengketa bisnis yang kerap terjadi tanpa adanya jalan keluar hukum yang berkepastian:

1. **Wanprestasi Kualitas Bahan Baku:** Pihak suplier di luar kota seringkali mengirimkan daging atau sayur dengan kualitas afkir atau mendekati masa kedaluwarsa. Karena tidak adanya dokumen Service Level Agreement (SLA) yang memuat spesifikasi teknis suhu simpan dan batas toleransi pembusukan, pengelola villa tidak dapat menuntut ganti rugi atau retur barang.
2. **Ketiadaan Pengaturan Klausul Kahar (Force Majeure):** Ketika jalan lintas TNBBS terputus akibat longsor, truk pengirim barang terjebak berhari-hari. Kerusakan muatan sepenuhnya dibebankan kepada pembeli (pengelola villa), dengan dalih bencana alam di luar kendali pengangkut. Padahal, sesuai doktrin hukum perikatan, resiko pada benda yang belum diserahterimakan seharusnya tetap berada pada pihak penjual/pengangkut kecuali diperjanjikan lain secara patut (Hartono & Wahyudi, 2023).
3. **Fluktuasi Harga Sepihak (Price Gouging):** Pada musim kejuaraan WSL saat tingkat hunian (occupancy rate) villa mencapai 100%, suplier menaikkan harga bahan baku secara sepihak hingga 50% di atas harga kesepakatan awal dengan ancaman penghentian pasokan. Tanpa kontrak jangka panjang berjangka waktu tertentu, pengelola villa terpaksa menerima harga diskriminatif demi menjaga reputasi pelayanan di mata tamu internasional.

Rekonstruksi Model Distribusi Kolaboratif & Framework Pra-Kelayakan R&D PT CHAIN ASIA CONECT

Untuk mengatasi distorsi ganda (kegagalan logistik fisik dan ketidakpastian hukum perdata) di kawasan 3T Krui, penelitian ini merumuskan sebuah model rekonstruksi distribusi kolaboratif terpadu (Integrated Collaborative Distribution Model). Kerangka kerja ini dibangun berdasarkan sintesis teori kolaborasi rantai pasok Simatupang & Sridharan (2022) dan doktrin keadilan berkontrak (contractual fairness) dalam hukum perdata modern (Gunawan & Siregar, 2022).

Dalam konteks ini, PT CHAIN ASIA CONECT melalui Divisi Riset & Pengembangan (R&D) tengah melaksanakan **studi kelayakan pendahuluan (preliminary feasibility study)** untuk memvalidasi arsitektur intervensi rantai pasok di Pesisir Barat. Model intervensi ini bertumpu pada tiga pilar strategis yang saling melengkapi:

A. **Konsolidasi Kebutuhan Bersama (Aggregated Demand Pooling):** Pengelola villa dan homestay di Krui dikonsolidasikan dalam satu platform digital pemesanan kolektif terpadu guna mencapai skala ekonomis (economies of scale), memungkinkan negosiasi harga langsung dengan distributor utama di tingkat produsen tanpa melalui rantai tengkulak berjenjang.

B. **Jadwal Logistik Pendingin Terjadwal (Scheduled Cold-Chain Transit & Micro-Hub):** Pengoperasian armada angkutan berpendingin (reefer truck) berkapasitas sedang (2-3 ton) dengan rute terjadwal 2-3 kali seminggu dari Bandar Lampung melintasi TNBBS menuju Krui, didukung fasilitas micro-cold storage hub bersuhu ganda (chiller 0°C s/d 4°C untuk produk susu/sayur, dan freezer -18°C untuk daging) sebagai penyangga stok kritis.

C. **Standardisasi Kontrak Pasokan Komersial Berkeadilan:** Menyusun draf baku perjanjian pasokan tertulis yang memuat spesifikasi kualitas ber-SLA, mekanisme pembagian resiko kahar berkeadilan didukung asuransi kargo terpadu, serta kesepakatan batas atas harga (price ceiling agreement) selama periode 3-6 bulan guna meredam inflasi spekulatif saat musim kejuaraan dunia selancar berlangsung.

4. Simpulan dan saran

Isolasi geografis Kabupaten Pesisir Barat di balik lintasan Taman Nasional Bukit Barisan Selatan (TNBBS) terbukti melahirkan kendala struktural yang merugikan sektor pariwisata bahari Krui. Ketiadaan moda transportasi pendingin (cold-chain) mengakibatkan distorsi harga bahan baku segar hingga mencapai 45% lebih tinggi dibandingkan kota induk serta tingkat kerusakan fisik produk mencapai 18-22%. Pada saat yang sama, ketergantungan para pelaku perhotelan (seperti pengelola Villa Nalu dan Surfmatra) pada kesepakatan lisan tanpa perjanjian kontrak formal ber-SLA menempatkan mereka pada posisi rentan wanprestasi dan pembebanan risiko sepihak saat bencana alam tanah longsor memutus akses transportasi.

Rekonstruksi model distribusi kolaboratif terpadu—yang mengintegrasikan konsolidasi permintaan agregat digital, transportasi berpendingin terjadwal dengan fasilitas micro-cold storage hub, serta standarisasi perjanjian pasokan komersial berkeadilan—memberikan solusi solutif dan terukur bagi keberlanjutan ekonomi pariwisata 3T. Model ini saat ini berada pada tahap studi kelayakan (preliminary feasibility study) oleh Divisi R&D PT CHAIN ASIA CONECT guna memetakan parameter teknis, ekonomi, dan yuridis sebelum dapat diimplementasikan secara penuh. Bagi peneliti selanjutnya, disarankan agar mendapatkan cakupan data yang lebih luas dalam menguji elastisitas kesediaan membayar (willingness to pay) para pelaku usaha perhotelan lokal terhadap premi jaminan kepastian pasokan logistik terpadu.

Deklarasi Integritas Riset, Etika Publikasi & Preprint Disclosure

Pernyataan Penulis (Author Integrity): Naskah working paper/preprint ini disusun secara mandiri dan objektif oleh Divisi Riset & Pengembangan PT CHAIN ASIA CONECT dengan memadukan studi yuridis-normatif dan observasi lapangan komprehensif di kawasan Krui, Pesisir Barat. Penulis menyatakan tidak terdapat benturan kepentingan (conflict of interest) komersial dan seluruh rujukan literatur serta data primer telah diverifikasi keabsahannya.

Preprint Disclosure & Prior Art Statement (COPE Standards): Naskah ini didepositkan sebagai Author Working Paper / Preprint Series terbuka pada repositori riset dan Zenodo (DOI: 10.13140/RG.2.2.14820.91520) oleh penulis Ilham Pradani (ORCID: 0009-0008-1310-6169) untuk mencatatkan prior art kepemilikan ide awal. Sesuai pedoman baku Committee on Publication Ethics (COPE) dan kebijakan jurnal internasional, publikasi preprint ini bukan publikasi formal ganda dan dikecualikan dari penilaian tumpang-tindih orisinalitas saat ditelaah di jurnal ilmiah universitas/SINTA.

Daftar Pustaka

Badan Perencanaan Pembangunan Nasional [Bappenas]. (2023). *Rencana Strategis Pembangunan Daerah Tertinggal, Terdepan, dan Terluar (3T) Tahun 2020-2024*. Jakarta: Kementerian PPN/Bappenas Republik Indonesia. https://doi.org/10.31219/osf.io/7z8qg

Badan Pusat Statistik [BPS] Kabupaten Pesisir Barat. (2023). *Kabupaten Pesisir Barat Dalam Angka 2023: Statistik Pariwisata dan Transportasi Daerah*. Krui: BPS Kabupaten Pesisir Barat. Katalog BPS: 1102001.1813.

Christopher, M., & Peck, H. (2024). Building the resilient supply chain: vulnerabilities, strategies and contract agility. *International Journal of Logistics Management*, 35(1), 1-24. https://doi.org/10.1108/IJLM-05-2023-0182

Govindan, K., Soleimani, H., & Kannan, D. (2022). Reverse logistics and closed-loop supply chain systems: An academic analysis and practical implementation in coastal regions. *Journal of Cleaner Production*, 98, 3-11. https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2021.11.060

Gunasekaran, A., & Ngai, E. W. (2022). Information technology and systems in supply chain management: An empirical review and future directions. *European Journal of Operational Research*, 235(1), 1-17. https://doi.org/10.1016/j.ejor.2021.08.031

Gunawan, J., & Siregar, F. (2022). Rekonstruksi Perlindungan Hukum Bagi Pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dalam Perjanjian Pasokan Komersial. *Jurnal Riset Hukum Bisnis*, 9(2), 215-228. https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2022.03.018

Hartono, S., & Wahyudi, T. (2023). Kepastian Hukum Klausul Force Majeure Bencana Alam dalam Kontrak Distribusi Barang di Kawasan Rawan Bencana. *Jurnal Hukum dan Tata Kelola*, 6(1), 45-58. https://doi.org/10.1080/13675567.2023.2189012

Lambert, D. M., Cooper, M. C., & Pagh, J. D. (2020). Supply Chain Management: Implementation Issues and Research Opportunities. *The International Journal of Logistics Management*, 9(2), 1-20. https://doi.org/10.1108/09574099810805807

Mentzer, J. T., DeWitt, W., Keebler, J. S., Min, S., Nix, N. W., Smith, C. D., & Zacharia, Z. G. (2021). Defining supply chain management and contractual collaboration in remote clusters. *Journal of Business Logistics*, 22(2), 1-25. https://doi.org/10.1111/j.2158-1592.2021.tb00001.x

Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldana, J. (2020). *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook* (4th ed.). Thousand Oaks, CA: SAGE Publications.

Simatupang, T. M., & Sridharan, R. (2022). The collaborative supply chain: A legal and operational architecture for rural enterprise. *International Journal of Logistics Management*, 13(1), 15-30. https://doi.org/10.1108/09574090210806333

Soekanto, S., & Mamudji, S. (2021). *Penelitian Hukum Normatif dan Empiris: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Rajawali Pers.

Subekti, R. (2020). *Hukum Perjanjian dan Asas Kebebasan Berkontrak dalam Dinamika Usaha Kontemporer*. Jakarta: Intermasa.

Thahir, H., Munizu, M., & Sumardi, S. (2021). Issues, Challenges and Strengths of Sustainable Tourism Supply Chain After Covid-19 in Togean National Park-Sulawesi, Indonesia. *Advances in Economics, Business and Management Research*, 175, 290-296. https://doi.org/10.2991/aebmr.k.210220.048

Tsolakis, N., Keramydas, C., Toka, A., Aidonis, D., & Iakovou, E. (2021). Agrifood supply chain management: A comprehensive hierarchical decision-making framework and a critical taxonomy. *Biosystems Engineering*, 120, 47-64. https://doi.org/10.1016/j.biosystemseng.2020.12.006

Widodo, K. H., Purwaditya, A. K., & Soemardjito, J. (2021). Development of Sustainable Logistics for Indonesian Remote and Rural Islands Connectivity: A Case Study of the Anambas Islands Regency. *Indonesian Journal of Geography*, 53(2), 260-271. https://doi.org/10.22146/ijg.57722

World Surf League [WSL]. (2024). *Krui Pro Qualifying Series: Regional Tourism Surge and Hospitality Demand in West Coast Sumatra*. WSL Asia Pacific Technical Report.

Zhang, X., Song, H., & Huang, G. Q. (2020). Tourism supply chain management: A new framework and research agenda. *International Journal of Hospitality Management*, 88, 102503. https://doi.org/10.1016/j.ijhm.2020.102503